



PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA

🏠 JL RAYA JARANAN DESA NGADIREJO KECAMATAN
KAWEDANAN, MAGETAN

☎ 0351439872

📠 0351438999

Telah disesuaikan dengan

SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020

2022



LAPORAN

PENERAPAN

TATA KELOLA



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja posisi 31-12-2022 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.236.354.672.588, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.27.671.910.301. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja selanjutnya..

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016



tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.

- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran .

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: DWIATMODJO BAHAGIO, SP
	NIK	:
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	
	:	
		<ol style="list-style-type: none">1. Membuat dan mengajukan rencana kerja dan anggaran bagian / perusahaan kepada Direktur Utama.2. Mengusulkan kepada Direktur Utama serta melaksanakan rencana bisnis dengan baik, aman dan lancar.3. Mengusulkan kepada Direktur Utama rencana pengembangan perusahaan sesuai dengan potensi yang dimiliki perusahaan, tujuan perusahaan dan kebijakan RUPS.4. Mengusulkan kepada Direktur Utama, pembuatan Keputusan / Kebijakan perusahaan demi kepentingan dan kemajuan perusahaan.5. Membuat dan mengajukan serta memastikan laporan keuangan selesai dikerjakan dan disampaikan kepada Direktur Utama secara tepat waktu dan benar sesuai dengan fakta.6. Melaksanakan seluruh rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa pelaksanaan tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan hanya berorientasi pada tujuan dan atau kemajuan perusahaan.7. Atas perintah Direktur Utama atau mewakili Direktur Utama atau dalam hal Direktur Utama berhalangan, menghadiri / melakukan pertemuan dengan pihak ketiga / mitra kerja / Bank Indonesia/OJK / pemerintah setempat / masyarakat / nasabah / Komisaris atas nama perusahaan dan untuk kepentingan perusahaan.8. Atas perintah Direktur Utama atau mewakili Direktur Utama atau dalam hal Direktur Utama berhalangan, melakukan perundingan dan atau negosiasi serta membuat kesepakatan dengan pihak ketiga / mitra kerja / Bank Indonesia/OJK / pemerintah setempat / masyarakat / nasabah / Komisaris atas nama perusahaan dan untuk kepentingan perusahaan.9. Melakukan koordinasi secara langsung dengan Direktur Utama untuk keperluan pelaporan kinerja antar bagian, pembahasan / evaluasi



		kinerja antar bagian dan pengambilan keputusan strategis / sektoral lainnya.
		10. Melakukan koordinasi secara langsung dengan Kepatuhan dan Manajemen Resiko untuk keperluan penanganan legalitas perusahaan, penanganan permasalahan hukum perusahaan khususnya yang berkaitan dengan kredit bermasalah, pengamanan perusahaan serta berbagai pertimbangan
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE
	NIK	:
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	1. Membuat dan atau menetapkan serta menandatangani rencana kerja dan anggaran perusahaan untuk diajukan kepada Komisaris dan Bank Indonesia/ OJK. 2. Membuat dan atau menetapkan serta melaksanakan rencana penghimpunan dana dan penyaluran kredit dengan baik, aman dan lancar. 3. Membuat dan atau menetapkan rencana pengembangan perusahaan sesuai dengan potensi yang dimiliki perusahaan, tujuan perusahaan dan kebijakan RUPS. 4. Membuat dan atau menetapkan Keputusan / Kebijakan perusahaan demi kepentingan dan kemajuan perusahaan. 5. Membuat dan atau menetapkan dan atau mengubah dan atau mengganti sistem operasional perusahaan supaya tetap dinamis sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan untuk kepentingan perusahaan. 6. Membuat dan atau menetapkan, menandatangani serta memastikan laporan keuangan selesai dikerjakan dan disampaikan kepada para pihak yang berhak secara tepat waktu dan benar sesuai dengan fakta. 7. Melaksanakan seluruh rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa pelaksanaan tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan hanya berorientasi pada tujuan dan atau kemajuan perusahaan. 8. Menemukan / mengenali potensi perusahaan dan peluang bisnis serta memanfaatkan peluang bisnis tersebut dengan mengoptimalkan potensi perusahaan yang tersedia demi kemajuan perusahaan. 9. Menghadiri / melakukan pertemuan dengan pihak ketiga / mitra kerja / Bank Indonesia /OJK/ pemerintah setempat / masyarakat / nasabah / Komisaris atas nama perusahaan dan untuk kepentingan perusahaan. 10. Melakukan perundingan dan atau negosiasi serta membuat kesepakatan dengan pihak



	ketiga / mitra kerja / Bank Indonesia /OJK/ pemerintah setempat / masyarakat / nasabah / Komisaris atas nama perusahaan dan untuk kepentingan perusahaan.
11.	Melakukan koordinasi secara langsung dengan notaris untuk keperluan pembuatan akta dan legalitas perusahaan lainnya.
12.	Melakukan koordinasi secara langsung dengan aparat hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara,
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
<p>Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.</p> <p>Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.</p> <p>Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.</p> <p>Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.</p> <p>Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.</p> <p>Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi.</p>	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : DRS. HARIYADI, MM</p> <p>NIK :</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan : <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan



	Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
	6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :
	a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau
	b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : DR. ARQOM KUSWANJONO, M.HUM</p> <p>NIK :</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan : <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan : <ol style="list-style-type: none"> Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
Rekomendasi Kepada Direksi	
	<ol style="list-style-type: none"> Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	DWIATMODJO BAHAGIO, SP		-	-
2	MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE		-	-



2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DWIATMODJO BAHAGIO, SP		tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE		tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DWIATMODJO BAHAGIO, SP		tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE		tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	DRS. HARIYADI, MM		-	-
2	DR. ARQOM KUSWANJONO, M.HUM	-	6.955.000	53,50%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-



E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DRS. HARIYADI, MM		tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DR. ARQOM KUSWANJONO, M.HUM		tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DRS. HARIYADI, MM		tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DR. ARQOM KUSWANJONO, M.HUM		tidak ada	tidak ada	KUSTRIYONO KAMIARTO- Saudara Kandung

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	756.000.000	2	478.000.000
2	Tunjangan	2	0	2	0
3	Tantiem	2	476.244	2	303.410
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			756.476.244		478.303.410



2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	1. Direktur utama mendapat fasilitas perumahan dengan sewa Rp. 25.000.000 / tahun 2. Direktur mendapat fasilitas perumahan dengan sewa Rp. 19.000.000 / tahun	Dewan komisaris tidak mendapatkan fasilitas perumahan
2	Transportasi	1. Direktur utama mendapatkan fasilitas transportasi 1 unit kendaraan Toyota Inova matic blackmica AE 1452 R 2. Direktur utama mendapatkan fasilitas transportasi 1 unit kendaraan Toyota Inova 2.0 nomor polisi AE 1046 RS	Dewan komisaris tidak mendapatkan fasilitas transportasi
3	Asuransi Kesehatan	Direksi dan keluarga mendapatkan asuransi kesehatan sinar mas	Dewan komisaris dan keluarga mendapatkan asuransi kesehatan sinar mas
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6,83	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,12	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,67	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,07	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2022-1-13	4	Isu-isu strategis BPR untuk menetapkan pakta integritas SDM, upaya penyelesaian NPL, Laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern, Rencana kerja audit intern tahun 2022, Ketentuan biaya perjalanan dinas, monitoring tindak lanjut temuan ojk tahun 2021
2	2022-2-7	4	- Memperbaiki kinerja keuangan yang belum mencapai target RBB melalui perbaikan pendapatan, biaya, NPL gross, ROA, BOPO dan Cash Ratio - Setoran tambahan modal sesuai RBB untuk mengcover credit growth periode tahun 2022
3	2022-3-12	4	- Evaluasi dan monitoring progres penyelesaian kredit bermasalah, tindak lanjut temuan OJK, Kinerja keuangan dan tingkat kesehatan BPR per Januari 2022 - Rencana strategis Dirut : Credit growth , funding growth, Penyelesaian NPL - Rencana strategis Dir : Ekadharma goes to digitalize



4	2022-4-14	4	- Kinerja keuangan dan Tingkat kesehatan bank bulan Maret 2022, Monitoring progres penyelesaian NPL dan tindak lanjut hasil audit OJK, Penerapan APU PPT
5	2022-5-13	4	- Rencana strategis Direksi sebagian besar tercapai termasuk pengembangan IT - Terdapat beberapa temuan hasil audit OJK dan audit intern yang masih on progres - Selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku dalam mencapai target 2022
6	2022-6-9	2	-Kinerja keuangan utama posisi Mei 2022 :Mencapai target RBB Mei 2022 dan lebih baik dari Mei 2021 (YoY) meliputi antara lain kredit yang diberikan, Deposito, ABP, ABA, Total pendapatan, laba sebelum pajak, laba bersih dan LDR - NPL Gross tanpa relaksasi covid menurun 0,39 % menjadi 2,67 % (Rp. 4, 85 miliar) - NPL Gross dengan relaksasi covid meningkat 0,40 % menjadi 2, 27 % (Rp. 4, 10 miliar)
7	2022-7-15	2	- Melakukan penanganan dan penyelesaian sedini mungkin atas O/S NPL tanpa relaksasi sehingga perbedaan kolektibilitas anata NPL relaksasi dan tanpa relaksasi terus mengecil dan target NPL 2022 < 1% tercapai - Issue / Rencana strategis dari direksi agar dimonitor dan dipantau secara insentif sehingga dapat dicapai secara tepat waktu dan tepat sasaran, utamanya credit growth lancar, low cost funding growth yang didukung dengan service excellent memanfaatkan penerapan pengembangan IT - Penyelenggaraan sistem APU PPT agar terus menerus diperbaiki atau ditingkatkan - Melakukan upaya persiapan dengan adanya rencana penerapan perubahan PPAP menjadi CKPN dengan mewaspadai dampaknya terhadap Laba/rugi jika kualitas aktiva produktif dalam kondisi menurun.
8	2022-8-24	2	Mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan yang telah mencapai target RBB serta membaik dari tahun lalu YoY dan memperbaiki kinerja keuangan yang belum mencapai target RBB : - Peningkatan asset agar diikuti dengan peningkatan rentabilitas secara sepadan - Optimalkan ABA dan ABP, kelebihan ABA disalurkan sebagai kredit untuk meningkatkan pendapatan bunga kredit dan kelebihan dana ABP dikurangi untuk menurunkan biaya bunga. - Pacu dana murah berupa tabungan dan hindari special rate deposito
9	2022-9-14	2	Mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan yang telah mencapai target RBB serta membaik dari tahun lalu dan memperbaiki kinerja keuangan yang belum mencapai target dengan efisiensi biaya : - Pacu dana murah, Optimalisasi ABA dan ABP, pangkas bunga simpanan, mengurangi ABP - Mengendalikan biaya perjalanan dinas, kendalikan biaya kendaraan dinas - Evaluasi aset dengan PPAP/ATMR besar - Menjaga DPK agar tidak menggelontor ke NPL
10	2022-10-12	2	- Direksi menindaklanjuti temuan hasil audit OJK dan audit intern tepat waktu dan tidak overdue - Mitigasi risiko baru terkait pemanfaatan perkembangan IT dan kerjasama dengan vendor IT - Selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan dan undang-undang yang berlaku.
11	2022-11-9	4	- Pencapaian kinerja BPR Ekadharma yang signifikan baik maka Direksi menganggarkan dalam RBB 2023 sebesar 10 % untuk kenaikan gaji karyawan. - Menjual asset idle dengan ATMR tinggi dan menggerus modal. - Menindaklanjuti temuan OJK terkait kekosongan Area Bisnis Manager diputuskan bahwa kekosongan ABM tidak di isi lagi dan segera di lakukan penyesuaian struktur organisasi.
12	2022-12-10	2	Dewan Komisaris menyetujui dan menetapkan RBB tahun 2023 sebagai target rencana bisnis Bank Ekadharma Bhinaraharja periode tahun 2023 yang wajib dicapai secara optimal.



2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	DRS. HARIYADI, MM		4	0	33,00%
2	DR. ARQOM KUSWANJONO, M. HUM		4	0	33,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total Fraud	-	-	-	-	-	3	-	2
Telah Diselesaikan		-		-		2		2
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		1		-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	1
Total	-	1

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2022-12-30	Sosial	Pembagian Nasi Box untuk jumat berkah	Masyarakat Umum	14.400.000
2	2022-03-01	Sosial	Bantuan perluasan lahan parkir di masjid gedhe al ikhlas	Masjid Gedhe Al Ikhlas	1.000.000
3	2022-03-14	Sosial	Bantuan dana kegiatan Haflah Akhirussabah	Pondok Pesantren Singo Walisongo Kartoharjo magetan	500.000
4	2022-04-11	Sosial	Acara buka bersama santunan anak yatim dan paket lebaran	Yayasan Al Hayat Magetan	500.000
5	2022-06-24	Sosial	Pembangunan Sarana Manasik Haji di Masjid Gedhe Al Ikhlas Kawedanan	Masjid Gedhe Al Ikhlas	5.000.000
6	2022-07-06	Sosial	Pembelian 2 ekor Kambing untuk qurban di Masjid Ar Rahman desa Ngadirejo Kawedanan	Masjid Ar Rahman	7.000.000
7	2022-08-08	Sosial	Bantuan dana kegiatan HUT RI Ke-77 warga gang masjid kelurahan Manguharjo	Kelurahan Manguharjo	1.500.000
8	2022-12-12	Sosial	Penggalangan sedekah pembangunan masjid Al Ikhlas	Masjid Gedhe Al Ikhlas	1.000.000

M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja, Terima Kasih.

MAGETAN, 26 Januari 2023
Persetujuan Pengurus PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja

DRS. HARIYADI, MM
Komisaris Utama

MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE
Direktur Utama



L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2022-12-30	Sosial	Pembagian Nasi Box untuk jumat berkah	Masyarakat Umum	14.400.000
2	2022-03-01	Sosial	Bantuan perluasan lahan parkir di masjid gedhe al ikhlas	Masjid Gedhe Al Ikhlas	1.000.000
3	2022-03-14	Sosial	Bantuan dana kegiatan Haflah Akhirussabah	Pondok Pesantren Singo Walisongo Kartoharjo magetan	500.000
4	2022-04-11	Sosial	Acara buka bersama santunan anak yatim dan paket lebaran	Yayasan Al Hayat Magetan	500.000
5	2022-06-24	Sosial	Pembangunan Sarana Manasik Haji di Masjid Gedhe Al Ikhlas Kawedanan	Masjid Gedhe Al Ikhlas	5.000.000
6	2022-07-06	Sosial	Pembelian 2 ekor Kambing untuk qurban di Masjid Ar Rahman desa Ngadirejo Kawedanan	Masjid Ar Rahman	7.000.000
7	2022-08-08	Sosial	Bantuan dana kegiatan HUT RI Ke-77 warga gang masjid kelurahan Manguharjo	Kelurahan Manguharjo	1.500.000
8	2022-12-12	Sosial	Penggalangan sedekah pembangunan masjid Al Ikhlas	Masjid Gedhe Al Ikhlas	1.000.000

M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja, Terima Kasih.

MAGETAN, 26 Januari 2023

Persetujuan Pengurus PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja


DRS. HARIYADI, MM
Komisaris Utama




MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE
Direktur Utama